



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 400.10.2/54/CIVJ/2025

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN KECAMATAN IV JURAI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : Surat Wali Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140.06/131/PN-PSP/2025 tanggal 16 Oktober 2025
perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang
Perubahan APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun
Anggaran 2025;
- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang
selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana
keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui
bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang
ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. Bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi
Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan
Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada
Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat
membentuk tim evaluasi;
- c. Bahwa Pemerintah kecamatan dalam fungsinya untuk
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
Undangan yang mengatur Nagari;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang
perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim
evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun
2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten

- Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Nomor 213);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor _);
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor _);
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :SALIDO
Pada tanggal : 17 Oktober 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10.2/54/CIVJ/2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.467.719.702,00 dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp.	-
2) Dana Transfer sebesar	Rp.	1.467.219.702,00
3) Pendapan Lain-lain sebesar	Rp.	500.000,00
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.323.490.883,43 dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	566.113.667,00
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	443.191.500,00
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	61.912.610,00
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	66.186.500,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	186.086.606,43
6) Surplus/Defisit	Rp.	(144.228.818,57)
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 144.228.818,57 dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	41.771.181,43
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	186.000.000,00
3) Pembiayaan Netto	Rp.	(144.228.818,57)
2. Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Selatan Painan Tahun 2025 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
- c. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang Perubahan APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 926.570.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 34.437.890,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 5.833.579,00.- Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.4.192.691,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 24.411.620,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Selatan Painan tentang APB Nagari Painan Selatan Painan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 506.211.812,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp.500.000,00 bersumber dari Bunga bank menyesuaikan dengan kondisi Nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh

Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang diatur dan diurus oleh Nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00 yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00 dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.15.600.000,00
- 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 284.100.000,00 yang terdiri dari Penghasilan Tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 223.500.000,00 dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.60.600.000,00
- 3) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 79.079.432,00
- 4) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Kedudukan Bamus sebesar Rp. 63.575.000,00
- 5) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 6.768.000,00
- 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 27.700.000,00

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Sebesar Rp. 2.456.000,00
- 2) Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp.5.325.000,00

C. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari (Reguler) sebesar Rp. 8.013.540,00
- 2) Pengelolaan administrasi/inventaris/penilaian aset desa Rp. 600.000,00
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari Sebesar Rp. 2.892.000,00
- 4) Pengembangan Sistem informasi desa Rp. 8.355.000,00

D. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9.016.315,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 151.650.000,00
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana Rp. 21.170.000,00

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pertemuan Bulanan Kader PPKBD dan sub PPKBD dan Transport Bidan Desa sebesar Rp. 13.800.000,00
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 98.070.000,00
- 3) Pada Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan, Rembug Stunting dll) sebesar Rp. 3.572.500,00
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kegiatan Rp. 13.800.000,00
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/prasarana Posyandu Rp.9.025.000,00

C. Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- 1) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan Rp.46.383.000,00

- 2) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa Rp. 12.058.000,00

D. Sub bidang pemukiman

- 1) Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum Rp.24.000.000,00

E. Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup milik desa Rp. 7.750.000,00

F. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika

- 1) penyelenggaraan informasi publik desa Rp. 41.913.000,00
- 2) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi Rp. 8.000.000,00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- 1) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bid. Hukum dan perlindungan Rp. 5.987.610,00

B. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan

- 1) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan Rp. 10.000.000,00
- 2) Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat Rp. 43.925.000,00

C) Sub Bidang kelembagaan masyarakat

- 1) pembinaan lembaga adat Rp. 2.000.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

- 1) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan Rp. 30.000.000,00

- 2) pelatihan dan penguatan penyandang difabel Rp. 4.900.000,00

B. Sub bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

- 1) pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah Rp. 10.000.000,00

C. Sub bidang dukungan dan penanaman modal

- 1) Pelatihan pengelolaan Bumdes Rp. 2.805.000,00

D)

Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

- 1) Pembentukan fasilitas/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi
Rp. 18.841.500,00

5. Bidang penanggulangan bencana , darurat dan mendesak saja

A. Sub bidang penanggulangan bencana

- 1) Kegiatan penanggulangan bencana Rp. 40.506.500,48

B. Sub bidang keadaan darurat

- 1) Penanganan keadaan darurat Rp. 15.980.105,95

C) Sub Bidang keadaan mendesak

- 1) penanganan keadaan mendesak Rp. 129.600.000,00

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

b. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Painan Selatan Painan dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.467.719.702,00 dan Belanja sebesar Rp. 1.323.490.883,43 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (144.228.818,57) Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 41.771.181,43 jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

1. Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.